

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peningkatan kasus perdagangan manusia selama tiga tahun terakhir semakin melonjak, dalam laporan Kementerian Luar Negeri dan Polri saja pada tahun 2021 sampai 2023 telah mengalami peningkatan sebanyak 100% disetiap tahunnya. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dalam menangani tren buruk perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia sendiri merupakan kejahatan transnasional yang modus operandinya bermanuver di lintas-batas antar negara. Indonesia sebagai salah satu negara penyalur tenaga migran menjadi negara yang sering dijadikan target modus operandi pelaku perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia sadar akan permasalahan ini yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan nasional saja. Diperlukannya sebuah wadah yang memfasilitasi komunikasi antar negara terkait dengan perdagangan manusia diperlukan Indonesia untuk mempersempit manuver dari kasus perdagangan manusia.

ASEAN Association of Police (ASEANAPOL) sebagai organisasi persatuan kepolisian negara anggota ASEAN telah memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan perdagangan manusia di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1981, ASEANAPOL mengalami perkembangan pada kegiatan-kegiatannya dalam misi negara anggota ASEAN untuk memerangi kejahatan transnsional khususnya perdagangan manusia melalui kerjasama yang erat dengan negara-negara ASEAN lainnya. ASEANAPOL telah menyediakan platform penting untuk pertukaran informasi intelijen, pelatihan untuk aparat penegak hukum serta koordinasi operasional lintas batas dan memfasilitasi pertemuan antar negara anggota. Ini tidak hanya memperkuat kapasitas Indonesia dalam menghadapi kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia, tetapi juga memperluas jaringan kerja sama yang essensial untuk melawan jaringan perdagangan manusia yang kompleks.

Program pelatihan yang diinisiasi oleh ASEANAPOL secara konsisten meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparat penegak hukum Indonesia dalam mengenali pola-pola perdagangan manusia, mengelola penyelidikan yang

rumit, dan memperlakukan korban dengan lebih manusiawi dalam hal perlindungan. Dengan mendapatkan akses ke praktik terbaik dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, Indonesia dapat memperbaiki responsnya terhadap perdagangan manusia, meskipun masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi hukum antar-negara dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan masalah ini.

Secara keseluruhan dapat penulis simpulkan bahwa ASEANAPOL sebagai forum kepolisian regional di Asia Tenggara, memiliki peran yang signifikan dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia. Dengan mengadopsi teori peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer, dapat dikatakan bahwa ASEANAPOL berfungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor. Pada peran sebagai instrumen, Indonesia bersama ASEANAPOL juga termasuk keberlanjutan dari memperjuangkan Hak Asasi Manusia. Sehingga meningkatnya trend perdagangan manusia yang dialami Indonesia, membuat Indonesia menggunakan instrumen ASEANAPOL sebagai organisasi kepolisian negara ASEAN dalam menjawab permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam memberantas praktik perdagangan manusia. Sehingga ASEANAPOL dapat dikategorikan memiliki peran sebagai instrumen oleh Indonesia karena melalui ASEANAPOL dapat terbangun forum yang membahas praktik perdagangan manusia dan outputnya berada di *Joint communique* ASEANAPOL terkait dengan upaya penanganan perdagangan manusia. Kemudian, hubungan *police to police* yang terjalin antar kepolisian negara anggota juga memudahkan Indonesia dalam permintaan ekstradisi dan *Mutul Legal Assistance*, sehingga ASEANAPOL juga dapat menjadi instrumen bagi pemerintah Indonesia untuk menjalin hubungan yang erat.

Selanjutnya peran sebagai arena, ASEANAPOL memiliki tugas utama dalam Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama dalam pertukaran informasi intelejen lintas-batas terutama terkait isu kejahatan internasional. Melalui Konferensi tahunan yang difasilitasi ASEANAPOL negara anggota dapat membahas isu kejahatan transnasional khususnya perdagangan manusia. Selain konferensi tersebut, ASEANAPOL memfasilitasi program pengembangan kapasitas yang ditujukan kepada aparat penegak hukum. pengembangan kapasitas tersebut biasanya berupa pelatihan-pelatihan sistem yang dikembangkan ASEANAPOL seperti e-ADS atau berupa pelatihan menggunakan seminar dengan

topik bagaimana menangani kasus kejahatan transnasional terorganisir di lintas-batas antar negara khususnya di ASEAN.

Sementara Archer mengemukakan bahwa peran arena Organisasi Internasional dapat dilihat pada aktivitas seperti menyediakan pertemuan untuk para anggota untuk berdiskusi, berpendapat, bekerjasama untuk membahas sebuah permasalahan yang dihadapi dan akan menciptakan sebuah keputusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Archer, 2001). Dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia, ASENAPOL telah menciptakan arena atau memberikan wadah dalam menghadapi perdagangan manusia. Walaupun dalam konferensi ASEANAPOL dan pengembangan kapasitas juga membahas isu perdagangan manusia yang menjadi salah satu topik utama isu kejahatan transnasional, namun pada tahun 2021 ASEANAPOL juga memfasilitasi pertemuan virtual yang di sebut *Virtual Dialogue on the Issues of Tackling Trafficking in Persons* yang didasari oleh fase pertama training dalam melawan perdagangan manusia dan juga sebagai realisasi dari resolusi yang tercantum dalam *Joint Committee* Konferensi ASEANAPOL ke-39.

Yang terakhir Archer mengemukakan bahwa Organisasi internasional dapat menjadi aktor independen dalam menangani permasalahan yang dihadapi (Archer, 2001). Maksud dari pernyataan tersebut adalah kenetralan yang diciptakan dalam konsep Organisasi Internasional merupakan poin penting bagi ASEANAPOL menengahi sebuah permasalahan karena tidak bisa dipengaruhi oleh pihak dari luar. Peran tersebut sangat krusial dalam keberlangsungan organisasi internasional karena konsep organisasi internasional sendiri adalah untuk kepentingan bersama, jika kenetralan organisasi tidak dapat dijamin, maka keberlangsungan organisasi tersebut akan terhambat akibat kecondongan ke salah satu pihak.

Sementara ASEANAPOL sendiri telah merancang sebuah skema dalam keberlangsungan organisasi supaya dapat menjadi aktor independen. Konferensi ASEANAPOL yang diadakan setiap tahun merupakan salah satu konsep dalam menciptakan kenetralan tersebut, pembuatan *Joint Committee* sebagai salah satu produk dari konferensi tersebut dibuat berdasarkan simpulan diskusi yang berlangsung. Terdapat juga penandatanganan oleh negara anggota dengan maksud bahwa *Joint Committee* yang telah terbentuk merupakan hasil dari keputusan

bersama sehingga setiap pihak yang menandatangani dianggap setuju dengan perolehan tersebut. Konferensi ASEANAPOL juga dilakukan bergiliran disetiap Negara anggota, sehingga setiap negara anggota berkesempatan mempersiapkan dan memimpin keberlangsungan konferensi. Disisilain pergantian tersebut juga diadaptasi dalam memilih ketua ASEANAPOL yang dapat dipimpin oleh setiap Kepala Kepolisian negara anggota atau pihak yang ditunjuk dan/atau berkaitan dengan isu yang dibahas ASEANAPOL. Kesepakatan tersebut menunjukkan ASEANAPOL ingin mencoba untuk menciptakan lingkungan yang netral dalam keberlangsungan organisasinya, sehingga keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan nantinya tidak merugikan salah satu pihak atau negara anggota dalam implementasiannya.

Dengan demikian, peran ASEANAPOL dalam upaya Indonesia melawan perdagangan manusia tidak hanya memperkuat kapasitas petugas penegak hukum di negara ini, tetapi juga menggambarkan pentingnya kerjasama lintas negara dalam menanggapi tantangan keamanan transnasional yang kompleks dan terus berkembang. Menurut narasumber juga kerjasama yang dilakukan negara anggota ASEAN sebenarnya cukup meningkatkan hubungan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perdagangan manusia. Akan tetapi, perbedaan yuridiksi antar negara anggota memang masih menjadi kendala sehingga posisi ASEANAPOL membantu para petugas penegak hukum untuk mendiskusikan segala permasalahan yang telah ada ataupun yang akan datang.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Untuk meningkatkan peran ASEANAPOL dalam mengatasi perdagangan manusia di Indonesia, terdapat beberapa saran praktis oleh penulis. Pertama, ASEANAPOL perlu memperkuat kerjasama antarnegara anggota dengan meningkatkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien tentang jaringan perdagangan manusia serta metode operasinya. Selain itu, pengembangan kapasitas aparat penegak hukum perlu selalu didorong melalui penyediaan pelatihan yang mendalam tentang teknik investigasi, perlindungan korban, dan penerapan teknologi dalam penyelidikan kejahatan untuk

menghadapi perkembangan kejahatan transnasional terorganisir, khususnya perdagangan manusia. Langkah selanjutnya adalah menyusun pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) bersama untuk penanganan kasus perdagangan manusia, sehingga pendekatan yang seragam dapat diterapkan di seluruh wilayah ASEAN, mengingat terdapat perbedaan struktur organisasi kepolisian antar negara anggota ASEANAPOL. ASEANAPOL juga perlu melakukan advokasi aktif untuk pengesahan kebijakan yang lebih ketat terkait perlindungan korban, sanksi terhadap pelaku, dan pencegahan kejahatan ini melalui monitoring dan evaluasi yang teratur atas langkah-langkah yang diambil, hal ini juga krusial untuk menilai efektivitas strategi penanggulangan. Terakhir, kolaborasi yang erat dengan organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah lainnya sebagai mitra dialog akan memperluas jaringan sumber daya dan pengalaman yang dapat juga memperkuat posisi ASEANAPOL dalam menghadapi tantangan perdagangan manusia secara komprehensif.

6.2.2 Saran Akademis

Dalam konteks akademis, ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk meningkatkan pemahaman dan pendekatan terhadap peran ASEANAPOL dalam menghadapi perdagangan manusia di Indonesia. Pertama, penelitian lebih lanjut yang mendalam dan terfokus perlu dilakukan untuk menganalisis efektivitas langkah-langkah yang telah diambil ASEANAPOL dalam menangani kasus perdagangan manusia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebijakan nasional, koordinasi lintas batas, dan peran masyarakat sipil. Kedua, pentingnya studi kasus yang lebih spesifik dan analisis komparatif antar-negara dalam ASEAN dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan kesempatan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban perdagangan manusia. Ketiga, pengembangan model atau framework evaluasi yang dapat diterapkan secara luas dapat memberikan panduan praktis bagi kebijakan publik dan praktisi dalam meningkatkan efektivitas tindakan kolektif ASEANAPOL. Dengan fokus pada riset yang lebih mendalam, analisis komparatif, dan pengembangan framework evaluasi, dapat memperkuat basis

pengetahuan dan implementasi kebijakan dalam upaya bersama untuk mengatasi perdagangan manusia di kawasan ASEAN.